

## Daftar Pustaka

- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau.
- Afdi Nizar, muhammad. 2000. *Kamus Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Azwar. 2019. *Analisis Kualitas Layanan sistem Manajemen Aparatur Responsif Terpadu Menggunakan Metode Servqual*. Universitas Muhammadiyah Riau: Riau.
- BAPPELITBANGDA. 2018. *Laporan Realisasi Anggaran*. Pasaman Barat.
- BAPPELITBANGDA. 2019. *Laporan Realisasi Anggaran*. Pasaman Barat.
- BAPPELITBANGDA. 2020. *Laporan Realisasi Anggaran*. Pasaman Barat.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Efendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (SAP Berbasis Akrual) (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harefa, Putri E. 2021. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2019*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Kainde, christian. 2013. *Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja daerah pada Pemerintah kota Bitung*. Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3: 393-400
- Komarudin. 2001. *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta, Bumi Aksara.
- Korua, Fernando S., Rumatte, Vekie A., & Siwu, Hanly F.Dj. 2016. *Pengaruh Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Tenaga Kerja Sebagai*

*Inverting Variabel Di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2013. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 1 2016. 410-417*

Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.

Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22 tahun 2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowinoto. 2013. *Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar Dan Panduan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia..

Riska. 2020. *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.

Sartika, Dewi. 2018. *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan.

Sudjana, Nana. 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Waris, Irwan. "Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governace". *Jurnal Kebijakan Publik* 2.2 (2012).